

Memorandum Hukum Sengketa Kepemilikan Tanah
Pada Gugatan Perdata No. 60/PDT.G/2014/PN.KWG

Vicky Feliani Hadiman

1288002

Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia sudah sering terjadi. Berbagai persoalan mengenai tanah di Indonesia masih sulit untuk dicegah oleh Pemerintah. Salah satu dari banyaknya sebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia adalah masih banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal ini membuat sulitnya untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang ada di Indonesia. Salah satu persoalan sengketa kepemilikan tanah ini jugalah yang diangkat oleh penulis di dalam Memorandum Hukum ini.

Memorandum Hukum ini ditulis secara sistematis berdasarkan pemaparan kasus yang dilengkapi tabel kasus posisi secara kronologis waktu dan pertanyaan hukum, pemeriksaan dokumen yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus posisi, tinjauan teoritik yang berisi penjelasan secara teori untuk membantu menjelaskan permasalahan pada kasus posisi, pendapat hukum yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul atas kasus posisi, diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

Penulis membahas mengenai praktik pinjam nama yang terjadi pada kasus posisi yang menjadi awal permasalahan, permasalahan yang terdapat pada keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris penggugat sebelum melakukan jual beli tanah, keabsahan akta jual beli yang dilakukan di depan PPATS/Camat yang mencantumkan nama penjual yang sudah meninggal serta langkah yang dapat dilakukan oleh tergugat sebagai pembeli beritikad baik.

Kata kunci: memorandum hukum, sengketa tanah, pinjam nama, jual beli tidak memenuhi syarat formal.

Legal Memorandum Over Land Dispute
Civil Case No. 60/PDT.G/2014/PN.KWG

Vicky Feliani Hadiman

1288002

Land dispute in Indonesia often happened. Government still can't prevent them from happening. One of many reasons that cause land dispute in Indonesia is because there are still many lands without certificate. This often cause the owner can't prove the land that they owned. Because of that reason, the author had decided to write this legal memorandum.

This legal memorandum was written systematically based on case position, legal questions, legislations that related with the case, theories that could explain legal questions and ended with summary and recommendations.

Author wrote about nominee contract that cause the case in the very beginning, problem with inheritance certificate from the plaintiff's side before they did the agreement, the deed with false information when they did the agreement and what the defendant as the buyer with good intention can do.

Key words: legal memorandum, land dispute, nominee agreement

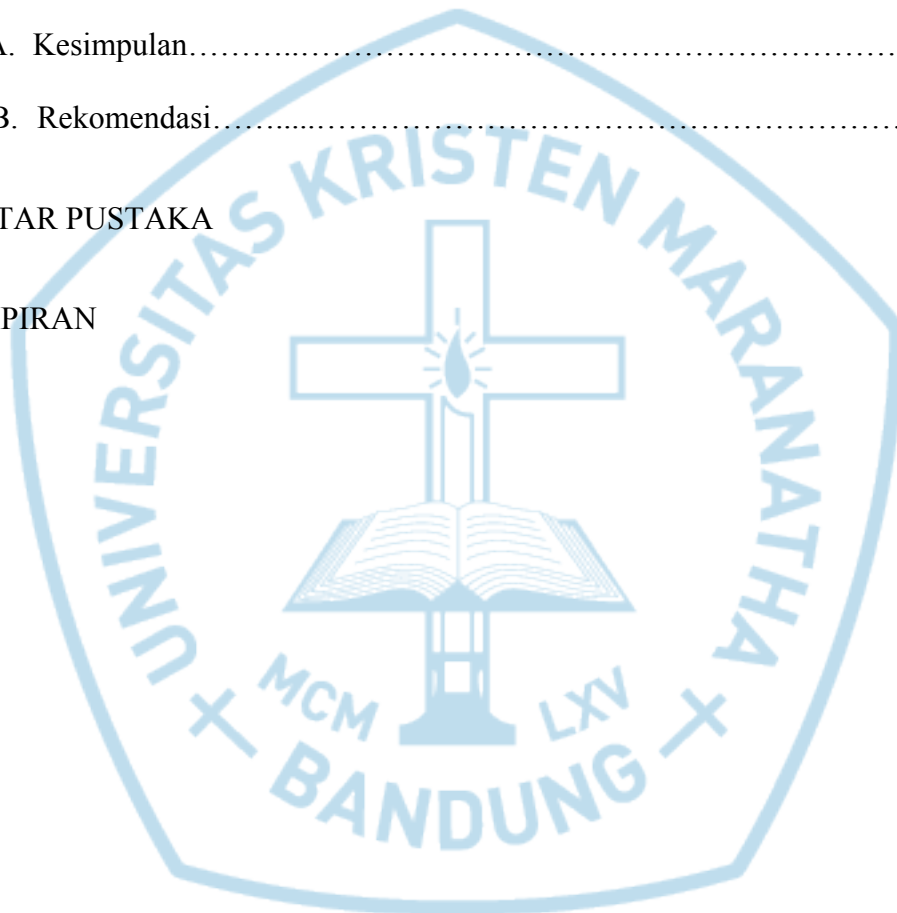
DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN REVISI.....	iii
MEMORANDUM HUKUM.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	17
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	19
A. Pemeriksaan Hukum.....	19
BAB III TINJAUAN TEORITIK.....	28
A. Sumber Hukum.....	28
B. Perjanjian.....	33

C. Hak Kepemilikan Tanah.....	45
D. Pendaftaran Tanah.....	46
E. Sertifikat.....	48
 BAB IV PENDAPAT HUKUM.....	 50
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 65
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Perdjandjian Hutang/Beli Kebun Bangbu
- Lampiran 2 Surat Djual Beli Tanah Kebun Bangbu Mutlak/Lepas
- Lampiran 3 Surat Keterangan Kewarisan N
- Lampiran 4 Bukti Kwitansi Pembayaran kepada SMN
- Lampiran 5 Bukti Kwitansi Pembayaran kepada SMT
- Lampiran 6 Akta Jual Beli No. 558/T/1993
- Lampiran 7 Surat Kuasa ahli waris N
- Lampiran 8 Surat Wawancara dengan Notaris Albertus Sutjipto
Budihardjoputra, S.H
- Lampiran 9 Matrix Revisi



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Kasus Posisi Secara Kronologis Waktu	10
-----------	--	----

